



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juni 2025

Halaman: 2

ENAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MASIH JADI CATATAN

Deviasi Kinerja Fisik dan Keuangan Sebabkan Serapan Rendah

YOGYA (KR) - Deviasi atau perbedaan realisasi kinerja fisik dan kinerja keuangan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) turut berdampak terhadap serapan di tingkat Kota Yogya. Terutama rendahnya serapan kinerja sehingga menuntut adanya percepatan di paruh waktu kedua tahun ini.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengatakan serapan kinerja fisik dan keuangan di OPD yang masih rendah membuat serapan di tingkat kota belum tinggi. "Ada kesenjangan antara realisasi fisik dan keuangan. Ini harus bisa diselesaikan dari tahun ke tahun. Tahun lalu seperti apa, dan tahun sekarang bagaimana dibandingkan tahun lalu apakah penyerapan di bulan yang sama lebih baik atau buruk. Itu menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan," tandasnya. Selasa (24/6).

Fihaknya mencatat kinerja atau realisasi fisik tahun ini sampai Mei mencapai 41,93 persen. Sedangkan kinerja keuangan di periode yang sama baru mencapai 29,19 persen. Ada enam OPD di lingkungan Pemkot Yogya dengan status kinerja fisik dan keuangan yang masuk kategori sedang, rendah dan sangat rendah. Hasto pun berharap jangan sampai hanya karena ada satu OPD yang serapannya masih rendah menjadikan penyerapan secara keseluruhan ikut buruk.

Oleh karena itu perlu ada pencerminan terhadap persoalan tersebut. Terutama bagi OPD yang realisasi kinerjanya masih rendah. Tahapan kegiatan atau pekerjaan serta hambatan menjadi pencerminan agar mencapai target realisasi kinerja fisik dan keuangan. Dirinya pun meminta paket-paket pekerjaan fisik seperti di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DUPUKP) yang masih berproses agar segera selesai akhir Juni. Hal ini agar pengerjaan bisa segera dimulai dan serapan keuangan misal untuk uang muka setidaknya sudah mencapai sekitar 30 persen. Termasuk realisasi pekerjaan dan kegiatan yang menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY juga diperhatikan.

Dirinya juga menyoroti mengenai batas waktu atau deadline pengerjaan kegiatan diselesaikan. Hasto mengingatkan batas waktu jangan di Desember karena pertengahan bulan sudah tutup buku. Di samping itu perlu waktu untuk mengantisipasi hal-hal lain. "Masalah deadline kapan mau dilelang, kapan kontrak, kapan dimulai pekerjaan dan selesai kapan, supaya nanti kita tidak kedodoran. Lebih baik di deadline paling telat November karena kalau nanti ada apa-apa masih punya waktu. Yang kira-kira bisa dieksekusi, segera dieksekusi biar bisa percepatan realisasi," terang Hasto.

Sementara salah satu OPD

yang mempresentasikan perkembangan kinerja fisik adalah DUPUKP Kota Yogya. Sekretaris DUPUKP Kota Yogya Erna Susanti menyebut target kinerja fisik sampai Mei 2025 mencapai 19,43 persen. Sedangkan realisasi fisik 13,35 persen sehingga ada deviasi 6,8 persen. Beberapa kegiatan yang masih berproses dan menjadi perhatian antara lain pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan berkala Jalan Sugeng Jeroni Cs, pembangunan rumah susun di Muja Muju, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala perkotaan dan pemeliharaan tebing sungai. "Tindak lanjutnya percepatan pelaksanaan kegiatan ada enam paket sudah berkontrak mulai Juni dan diperkirakan selesai paling lambat pertengahan Oktober. Tiga paket pekerjaan masih proses pemilihan penyedia dan satu paket belum dilimpahkan. Kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Sugeng Jeroni CS Sudah ada pemenang dan rencana kontrak akhir Juni," urainya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2-KB) Kota Yogya Sarmin, menjelaskan sampai akhir Mei 2025 realisasi keuangan mencapai sekitar 55 persen.

Hambatannya adalah adanya penundaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait kepastian efisiensi dana transfer pusat, sehingga awal pelaksanaan

fisik mengalami kemunduran. DAK itu untuk renovasi gedung dan bangunan UPT Perlindungan Perempuan dan

Anak. "Karena proses di awal tahun sempat ada efisiensi dari pusat, sehingga sempat terhenti. Baru setelah ada surat dari

kementerian, proses kami lanjutkan sehingga proses pencairan uang muka agak sedikit mundur. Pekerjaan sudah dim-

ulai dan akan dilakukan percepatan pencairan uang muka pada bulan Juni," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005